



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Selasa

Tanggal: 05 Juni 2012

Halaman: 10

Kuota Pemegang KMS SMP Dibatasi 25%

YOGYA (KR) - Tahun ini kuota pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) untuk tingkat SMP dibatasi 25 persen. Tahun lalu, kuota tersebut hanya terisi 23 persen. Hal ini terjadi karena beberapa siswa pemegang KMS lebih memilih sekolah negeri di luar kota, terutama wilayah Bantul dan Sleman yang berdekatan dengan Kota Yogyakarta.

"Memang kalau dibandingkan siswa lulusan SD pemegang KMS sebanyak 1.057 siswa, maka kuota untuk masuk SMP negeri di dalam kota masih kurang. Karena hanya 853 siswa," papar Ketua Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Yogyakarta, Samiyo, Senin (5/6).

Samiyo mengatakan, meski siswa pemegang KMS nantinya bersekolah di luar kota, namun mereka tetap berhak mendapatkan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) dari Dinas Pendidikan Kota. Oleh karena itu, siswa miskin tidak perlu khawatir perihal akses pendidikan. Sementara kuota KMS tingkat SMA/SMK di

Kota Yogyakarta sudah terisi lebih dari kuota. Dari jumlah lulusan SMP pemegang KMS sebanyak 1.019 siswa, kuota untuk SMA sebesar 5 persen (133 siswa) dan SMK sebesar 25 persen (968 siswa). "Kuota KMS lulusan SMP kami arahkan untuk masuk ke SMK sehingga nanti bisa siap kerja," ujarnya.

Terkait akses pendidikan bagi siswa KMS tersebut, lanjut Samiyo, Dinas Pendidikan kini mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat hingga tingkat kelurahan. Pendaftaran calon siswa pemegang KMS, baik tingkat SMP, SMA dan SMK, dilakukan lebih awal, yakni 20-25 Juni

di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Sedangkan pendaftaran dilakukan di sekolah yang akan dituju pada 25-26 Juni.

Untuk pendataan, calon siswa pemegang KMS harus menyerahkan fotokopi kartu ujian, fotokopi SKHUN atau surat keterangan pengganti SKHUN serta fotokopi KMS yang telah dilegalisir kelurahan setempat. Sedangkan saat pendaftaran di sekolah, wajib menyerahkan tanda bukti pendataan, lembar fotokopi ijazah yang telah dilegalisir, KMS yang telah dilegalisir, SKHUN asli dan 1 lembar fotokopi yang telah dilegalisir.

Sementara itu ketika diminta komentar terkait dengan hal itu, sejumlah kelurahan di Kota Yogyakarta mengaku sudah mulai melakukan sosialisasi dan pendataan KMS. Seperti yang dilakukan Lurah Karangwaru

Suhardi SIP. Menurutnya, setiap ada pertemuan dengan warga, pihaknya selalu menyosialisasikan terkait dengan KMS. Hal itu dilakukan untuk memudahkan warga dalam mendapatkan layanan yang optimal, termasuk pendidikan. "Saat ini jumlah pemegang KMS di Kelurahan Karangwaru ada 403 kepala keluarga (KK). Sejak beberapa minggu terakhir di antara mereka sudah mulai mengurus kelengkapan administrasi untuk sekolah anak-anaknya," terang Suhardi.

Terpisah Lurah Kotabaru Saptahadi SIP mengungkapkan, jumlah penduduk pemegang KMS di Kelurahan Kotabaru setiap tahun mengalami penurunan. Hal itu karena ada beberapa lembaga keuangan mitra kerja pemerintah kelurahan yang masih berjalan di bawah koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMPK). (M-6/Ria/War)-s

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Tembusan Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. <u>Dinas Pendidikan</u>	☐ Negatif	☐ Amat Serius
2.	☐ Positif	☐ Segera
3.	☒ Netral	☒ Biasa
4.		
5.		

✓ Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005